



## Mitigasi Bencana Desa Salotenga (Penguatan Desa Salotenga sebagai Desa Tanggap Bencana)

Rudi Karma\*, Muhlis

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Puantrimaggalatung

### Artikel Info

*Artikel Histori*

*Submisi:*

05 April 2018

*Penerimaan:*

20 Agustus 2019

### Keywords:

Bencana, Mitigasi,  
Salotenga

### ABSTRAK

Bencana alam adalah peristiwa yang sudah kerap terjadi di Desa Salotenga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. Bencana alam yang kerap terjadi di desa ini adalah Bencana Banjir dan bencana longsor daerah aliran sungai (DAS). Permasalahan yang muncul dari warga desa salotenga terkait bencana alam ini adalah sebagai berikut (1) Kondisi desa Salotengnga yang rawan terhadap bencana alam longsor Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Bencana banjir. (2) Minimnya pengetahuan warga terhadap bahaya dan dampak bencana alam longsor Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Bencana banjir. (3) Belum adanya upaya untuk meminimalkan resiko yang bisa menimpa warga desa. Berdasarkan kebijakan dan strategi Mitigasi Bencana PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2006, maka Metode yang digunakan adalah Memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Penyuluhan ini akan dilaksanakan dengan melibatkan warga yang ada beserta aparat desa Salotenga. Hasil dari kegiatan ini adalah (1) Pemahaman warga yang meningkat setelah mengikuti Seminar Mitigasi bencana dan (2) Tersedianya Peta Medan dan informasi sistem alur evakuasi. Seminar ini untuk memberikan pemahaman terkait Kesiap siagaan bencana yang didalamnya dibagi kedalam beberapa materi. Dalam kegiatan kedua adalah pemetaan medan, maksudnya adalah memberikan gambaran umum kondisi desa Salotenga terkait daerah rawan banjir, juga mendata daerah aliran sungai yang rawan terjadi longsor pinggir sungai. Gambaran ini juga dipadukan dengan peta desa yang memuat beberapa informasi lain didalamnya seperti alur efakuasi ketika terjadi banjir, titik pengungsian, dan posko tanggap bencana.

### 1. Pendahuluan

Bencana alam di Indonesia bukanlah suatu yang asing terdengar, bagaimana tidak bencana alam sudah mulai menjadi siklus musiman dan sudah menjadi langganan warga masyarakat. Bencana alam yang kerap terjadi adalah seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Bencana alam yang terjadi bukannya terjadi tanpa sebab yang jelas, eksploitasi pemanfaatan lahan dan sumber daya alam secara bebas telah menjelma sebagai akar persoalan dari bencana yang terjadi.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang dimuat dalam web resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional menyatakana bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor

nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia adalah Banjir, badai puting beliung, Tanah Lonsor, Gempa, Letusan gunung merapi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan. Bahkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan tanggap penanganan bencana dibentuklah suatu badan nasional yang khusus bertugas menangani bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga memiliki cabang sampai pada tingkat kabupaten.

Bencana alam tersebut bisa dikatakan telah merata diseluruh pelosok wilayah Indonesia, kita tidak telalu jauh meraba untuk melihat kondisi tersebut, contohnya Jakarta yang pada hakikatnya adalah Ibu kota negara bahkan sudah menjadi langganan banjir yang tiap tahunnya biasa terjadi di bulan Desember sampai Maret. Seperti data BNPB yang dilansir di detik news tertanggal 3 maret 2018 bencana yang terjadi sebanyak 513 bencana selama periode januari sampai maret 2018. Dari 513 kejadian bencana tersebut terdiri dari puting beliung 182 kejadian, banjir 157, longsor 137, kebakaran hutan dan lahan 15, kombinasi banjir dan tanah longsor 10, gelombang pasang dan abrasi 7, gempa bumi merusak 3, dan erupsi gunung api 2 kali. Dampak bencana tersebut, ada 72 orang meninggal dunia dan hilang, 116 jiwa luka-luka, dan lebih dari 393 ribu mengungsi dan menderita. Sebanyak 12.104 rumah rusak meliputi 1.566 rumah rusak berat, 3.141 rumah rusak sedang dan 7.397 rumah rusak ringa.

Desa Salotengnga yang secara geografis merupakan salah satu desa yang dilintasi sungai Walenna yang bermuara di teluk Bone Kabupaten Bone. Kondisi masyarakat pada umumnya menggantungkan perekonomiannya dengan bermata pencaharian sebagai petani, kondisi ini membawa dampak pada kurangnya kesadaran akan bagaimana pemanfaatan lahan tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) tentunya hal ini bisa menjadi pemicu bahaya Bencana Alam yang sering terjadi di desa Salotengnga. Hal tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan karena desa Salotengnga ini rutin menjadi langganan banjir, selain banjir penggerusan daerah aliran sungai juga menjadi ancaman longsor. Bencana alam yang terjadi terkadang juga bersumber dari pemanfaatan lahan yang kurang memperhatikan dampak lingkungan

Bencana alam yang sering terjadi khususnya yang mulai meresahkan warga desa Salotengnga adalah adanya longsor Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Bencana Banjir. Bencana Banjir yang berupa genangan atau banjir bandang dapat bersifat merusak. Aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapi cepat dan bergolak (turbulent) dapat menghanyutkan manusia dan binatang. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material berupa batuan yang lebih berat sehingga mampu menimbulkan daya rusak. Banjir air pekat ini akan mampu merusak fondasi bangunan yang dilewatinya terutama fondasi jembatan sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan

bangunan dan menghanyut-kannya. Pada saat air banjir telah surut, material yang terbawa banjir akan diendapkan ditempat tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman, perumahan serta timbulnya wabah penyakit. Tidak jarang pula bencana banjir juga mengakibatkan lonsor DAS dalam waktu yang sangat singkat.

Bencana lonsor Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Bencana Banjir ini di mungkinkan dengan kondisi desa Salotengnga yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Sabbangparu secara umum memiliki kondisi letak geografis hampir 71 % daratannya berada di ketinggian 7 sampai 25 meter diatas permukaan dengan luas mencapai 8.760 HA. Sedangkan rawa hampir 9 % (PPSP WAJO).

Longsor Daerah Aliran Sungai (DAS) terjadi baik di induk sungai maupun anak sungai. Sebagai desa yang dilintasi aliran sungai Walenna dengan panjang 28,5 Km, desa Salotengnga memiliki Kontur aliran sungai yang berkelok dan ditambah lagi dengan pemanfaatan daerah pinggir sungai sebagai lahan perkebunan membuat sepanjang aliran sungai sangat rawan akan bencana lonsor DAS, bahkan salah satu infrastruktur penting masyarakat yang terancam dengan lonsor DAS ini adalah jembatan besar "Allimbangengnge" yang menjadi salah satu akses penghubung utama dengan beberapa desa bahkan merupakan jalur alternatif menuju Kabupaten Soppeng. Padahal jembatan tersebut baru beberapa tahun diresmikan dan dimanfaatkan masyarakat umum bukan hanya warga desa Salotengnga, tapi melihat kontur pergerakan tanah bisa diprediksi dalam beberapa kurun waktu mendatang bisa saja kondisinya terancam dengan adanya lonsor DAS jika tidak ada upaya penanganan pencegahan yang nyata. Hal ini telah terjadi di desa yang berseblahan dengan desa Salotengnga yaitu desa Wage yang memiliki jembatan gantung yang menghubungkan desa Wage dengan desa Massapa kini telah hilang akibat lonsor DAS bahkan lonsor meluas sampai kurang lebih 25 meter yang tentunya sangat merugikan baik dari segi materi dengan terputusnya akses mobilitas warga. Selain itu lonsor DAS ini juga setiap saat mngintai dan meresahkan warga dengan terancamnya tempat pemukiman dan perkebunan warga yang berada di sepanjang DAS ini.

Upaya penanganan bencana lonsor DAS tersebut belum terlihat secara nyata baik dari warga, hal ini terjadi dikarenakan terkendala dari faktor pendanaan, karena di beberapa daerah penanggulangan lonsor DAS dilakukan dengan membangun dinding buatan sepanjang DAS dengan tembok jaring batu atau dengan penanaman dinding cor beton yang tentunya ke dua langkah tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit.

Selain lonsor DAS yang telah menjadi persoalan utama dalam bencana alam yang terjadi di desa Salotengnga, ancaman bencana alam lainnya terjadi adalah ketika musim penghujan adalah bencana banjir yang juga hampir menjadi langganan tahunan kerap terjadi. Seperti data yang dimuat pada tanggal 21 Juni 2018 di Pusat Krisis Kesehatan KEMENKES RI bahwa bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Sabbangparu yang didalamnya juga termasuk desa Salotengnga

telah merendam 2.715 rumah warga dengan total 6.287 warga yang terdampak. Banjir yang terjadi biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama dengan kedalaman bisa mencapai 2 sampai 3 meter.

Sama halnya bencana banjir di daerah lain permasalahan juga dihadapi oleh warga desa Salotengnga seperti terputusnya akses jalan membuat warga terisolir, ancaman kehilangan harta benda bahkan kehilangan nyawa pada saat banjir terjadi. Tidak sampai disitu, kondisi yang mengancam warga juga terjadi pada saat banjir surut dengan munculnya berbagai penyakit yang muncul pasca banjir ini diantaranya Diare, Demam Berdarah (DBD), dan penyakit kulit.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan warga desa salotengnga terkait bencana alam: 1) kondisi desa Salotengnga yang rawan terhadap bencana alam longsor Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Bencana banjir; 2) minimnya pengetahuan warga terhadap bahaya dan dampak bencana alam longsor Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Bencana banjir; 3) belum adanya upaya untuk meminimalkan resiko yang bisa menimpa warga

### **3. Metode**

Berdasarkan kondisi lingkungan yang terdapat di desa Salotengnga yang masyarakat dituntut tidak hanya tinggal diam dengan keadaan yang ada tanpa upaya yang nyata dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Berangkat dari pengalaman dan pengetahuan yang minim, langkah pertama yang harus sesegera mungkin dilakukan adalah memberikan pengetahuan akan ancaman serta dampak bencana alam. Peningkatan kemampuan adaptasi bencana harus pula dibarengi dengan terbentuknya suatu sistem ketersediaan informasi dan penanganan bencana baik sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi.

Dalam menentukan metode pelaksanaan yang akan diterapkan dalam mitigasi bencana desa Salotengnga mengacu pada kebijakan dan strategi Mitigasi Bencana PERMENDAGRI

#### **3.1 Kebijakan**

- a. Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
- b. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.
- c. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.
- d. Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.

### 3.2 Strategi

- a. Pemetaan. Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Pada saat ini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat berguna bagi pengambil keputusan terutama dalamantisipasi kejadian bencana alam. Meskipun demikian sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah (1) Belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan (2) Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik (3) Peta bencana belum terintegrasi (4) Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya.
- b. Pemantauan. Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana.
- c. Penyebaran informasi Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara: memberikan poster dan leaflet kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana, tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu kawasan tertentu. Koordinasi pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi diperlukan mengingat Indonesia sangat luas.
- d. Sosialisasi dan Penyuluhan Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada SATKOR-LAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan Pemerintah Daerah ialah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa yang perlu ditakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.
- e. Pelatihan/Pendidikan Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk.
- f. Peringatan Dini Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinyu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan

secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa antara lain pengalihan jalur jalan (sementara atau seterusnya), pengungsian dan atau relokasi, dan saran penanganan lainnya.

Berdasarkan kebijakan dan strategi Mitigasi Bencana PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2006 tersebut, maka Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program Mitigasi Bencana Desa Salotengnga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dalam upaya pencegahan bencana tanah longsor dan bencana banjir adalah Memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

Penyuluhan ini akan dilaksanakan dengan melibatkan warga yang ada beserta aparat desa Salotenga. Dalam penyuluhan ini akan diberikan materi yang terkait dengan:

- 1) Mitigasi bencana Banjir meliputi apa yang harus dilakukan sebelum terjadi banjir (penanggulangan), pada saat terjadi banjir termasuk sistem peringatan dini dan evakuasi serta penanganan pasca banjir.
- 2) Bencana longsor DAS meliputi bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara bijak, penyebab dan cara penanggulangan Longsor DAS ini.
- 3) Materi Khusus terkait pemanfaatan tanaman bambu yang mampu membantu dalam pengurangan resiko banjir, Longsor DAS, bahkan bencana kekeringan

Penyuluhan ini akan dikordinir langsung oleh tim pelaksana dan 2 mahasiswa dengan turut melibatkan pemateri yang ahli di bidangnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Wajo, Palang Merah Indonesia dan Dosen Biologi.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **4.1 Hasil**

Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut

##### **a. Kordinasi Tim**

Setelah penandatanganan kontrak oleh pihak LPPM Universitas Puangrimaggalatung maka langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan kordinasi dengan tim pelaksana, dimana pelaksana inti adalah dua orang Dosen (ketua dan Anggota) dibantu oleh dua mahasiswa. Dalam kegiatan ini kembali dibahas tahapan-tahapan yang harus disiapkan dan dilakukan nanti selama kegiatan ini. Selain itu pada tahapan ini juga dilakukan pembagian tugas, seperti penanggung jawab pengadaan barang, penanggung jawab kordinasi, dan hal lain yang dianggap perlu.

#### b. Perizinan dan sosialisasi

Pada tahap perizinan ini dimaksudkan untuk mendapatkan izin secara tertulis dari pihak kampus melalui LPPM yang nantinya akan menjadi rekomendasi pelaksanaan kegiatan yang akan diajukan ke Desa nantinya. Setelah mendapatkan perizinan dan rekomendasi kegiatan, maka dilanjutkan dengan koordinasi dengan pihak desa untuk mendapat perizinan dan sosialisasi tahap awal tentang pelaksanaan kegiatan nantinya. Terkait pelaksanaan sosialisasi dilakukan penjangkauan terhadap pihak desa, karang taruna dan warga sekitar tentang apa sebenarnya bentuk, maksud, tujuan dan pelaksana dari kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan guna memberikan pemahaman dan gambaran awal bagaimana kegiatan kami nantinya.

#### c. Administrasi dan Persuratan

Pada tahapan ini, tim melakukan persiapan terkait kelengkapan administrasi yang akan digunakan selama kegiatan nanti seperti penyusunan absen, penyusunan random acara, penentuan meteri dan pemateri, moderator, notulen, MC, dan hal lainnya terkait kelengkapan yang dianggap mampu menunjang jalannya acara nantinya. Pada tahapan ini juga sudah dilakukan persuratan untuk terlaksananya kegiatan seperti undangan menghadiri acara oleh LPPM, Dekan, Wakil Dekan, Kepala desa, Warga, juga pemateri yang akan menjadi pembicara dalam kegiatan nantinya.

#### d. Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan ini terbagi dalam dua kegiatan yaitu

##### 1. *Seminar Mitigasi bencana*

Seminar ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait Kesiapsiagaan bencana yang didalamnya dibagi kedalam beberapa materi seperti Pemahaman awal mitigasi bencana, bahaya bencana Banjir, Longsor Daerah Aliran Sungai (DAS), kekeringan dan pemanfaatan lahan.

Pemateri yang digunakan sebagai pembicara dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pemateri dari perutusan Palang Merah Indonesia Kabupaten Wajo yang didalamnya meliputi materi manajemen Posko, Manajemen Bencana, termasuk Peringatan Dini juga semua aspek terkait siklus bencana (Sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadi bencana, dan pasca bencana itu sendiri) yang tetap memfokuskan pembahasan pada bencana Banjir, Longsor Daerah Aliran Sungai, dan Bencana Kekeringan (kesulitan air bersih). Selain dari PMI juga dilibatkan dosen Biologi yang membahas tentang bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan lahan, juga tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pencegahan bencana khususnya bencana Banjir, Longsor Daerah Aliran Sungai, dan kekeringan.



Gambar 1. Pelaksanaan Seminar Mitigasi Bencana

## 2. Pemetaan Medan

Dalam kegiatan kedua ini adalah pemetaan medan, maksudnya adalah mencoba memberikan gambaran umum kondisi desa Salotenga terkait daerah rawan banjir berdasarkan tingkat kedalaman pada saat terjadi banjir, juga mendata daerah aliran sungai yang rawan terjadi longsor pinggiran sungai. Gambaran ini nantinya akan di padukan dengan peta desa yang juga akan memberikan beberapa informasi lain didalamnya seperti alur efakuasi ketika terjadi banjir, titik pengungsian, dan posko tanggap bencana.

### 4.2 PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan dan dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan dari DRPM RISTEK DIKTI juga LPPM Universitas Puangrimaggalatung. Berdasar dari seringnya terjadi bencana banjir yang sudah menjadi bencana siklus tahunan di Kabupaten Wajo khususnya Desa Salotenga yang terkadang menimbulkan dampak kerugian mteril bahkan nyawa disamping dampak lainnya pasca bencana terjadi, selain itu kondisi geografis Desa Salotenga yang berada di sepanjang sungai Walennae ternyata juga memberikan ancaman Longsor yang hamper banyak terjadi di pinggiran sungai tersebut. Melihat hal ini maka diupayakan memberikan pemahaman dalm bentuk seminar dan upaya lainnya yang bisa meminimalkan resiko bencana.

Salah satu target yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah bertambahnya pemahaman masyarakat terkait bagaimana meminimalkan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Pengetahuan ini mencakup apa yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi, pada saat terjadinya bencana, dan pada saat setelah bencana terjadi. Selain upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan khususnya banjir dan longsor, pengurangan resiko bencana juga dilaksanakan dalam bentuk pengadaan sarana petunjuk arah alur evakuasi dan pemetaan daerah rawan bencana. Khusus pemetaan daerah rawan bencana bertujuan untuk memberikan gambaran umum desa yang bisa digunakan dalam penetapan kebijakan terkait upaya pengurangan resiko dalam jangka panjang seperti daerah yang bisa dilakukan penghijauan atau penanaman untuk pengurangan dampak longsor DAS.

Secara keseluruhan respon masyarakat menyambut baik kegiatan ini karena kondisi bencana memang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi warga. Partisipasi aktif masyarakat kami upayakan guna mewujudkan masyarakat tanggap dalam kesiapsiagaan bencana, karena dengan memberikan pemahaman dini di usia muda diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat yang tanggap akan bencana.

## **5. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlaksananya program PKM ini bisa mewujudkan desa Salotenga yang tanggap akan bencana. Perwujudan tanggap bencana sendiri didasarkan pada apa yang harus dilakukan sebelum terjadinya bencana, pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana. Hasil dari kegiatan ini yang menjadi bekal awal bagi masyarakat adalah berupa pengetahuan yang dimiliki oleh warga terkait kesiapsiagaan bencana itu sendiri. Selain itu sarana pendukung guna mewujudkan tanggap sebelum bencana berupa peta mitigasi bencana dan papan arah evakuasi bencana pada saat terjadinya bencana sudah diadakan. Sedangkan sarana dalam mewujudkan kesiapsiagaan bencana harus dilaksanakan secara bertahap dengan perencanaan jangka panjang dengan dukungan dari pihak desa dan kesadaran masyarakat.

## **6. Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diantaranya:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti yang telah membiayai pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
2. Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Puangrimaggalatung.
3. Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Puangrimaggalatung.

4. Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNiversita Universitas Puangrimaggalitung.
5. Bapak/Ibu rekan-rekan Dosen dan Staf FKIP Uniprima
6. Pihak Aparat dan warga desa Salotenga yang telah mensupport dan merespon baik kegiatan pengabdian ini.
7. Mahasiswa yang sempat terlibat membantu dalam pelaksanaan kegiatan
8. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

### **Referensi**

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2018. Defenisi dan Jenis Bencana. from [https://bnpb.go.id//definisi-bencana /](https://bnpb.go.id//definisi-bencana/).
- Detik News. 2018. 513 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Sejak Januari-Maret 2018. from <https://news.detik.com/berita/3895731/513-bencana-alam-terjadi-di-indonesia-sejak-januari-maret-2018>.
- Pusat Krisis Kesehatan. Banjir di Wajo, Sulawesi Selatan, 15-05-2018. Kementrian Kesehatan RI. from <http://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-di-WAJO-SULAWESI%20SELATAN-15-05-2018-83>.
- Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana P2MB. 2018. Mitigasi. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). from [http://p2mb.geografi.upi.edu/Mitigasi\\_Bencana.html](http://p2mb.geografi.upi.edu/Mitigasi_Bencana.html)